



Laporan Kinerja 2020



BappedaLampung



@bappeda.lpg



bappeda_lampung

www.bappeda.lampungprov.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk penyusunan evaluasi dan pencapaian rencana kerja tahun selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020.

BAPPEDA

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

AMPUNDE PRINCIPAL BAPPEDA,

III. MULYADI IRSAN, M.T

AMPUNDE PRINCIPAL BAPPEDA,

III. MULYADI IRSAN, M.T

III. MU



Ringkasan Ksekutif

Sesuai dengan DPA tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2020, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 25.038.524.140,- terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 12.590.979.950,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.717.544.190,-. Dengan dukungan anggaran Belanja Langsung tersebut BAPPEDA melaksanakan 10 program dan 61 kegiatan yang terbagi kedalam 2 sasaran utama dan 1 sasaran pendukung. Untuk 2 sasaran utama terdiri 6 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.492.003.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.051.415.770,- atau 77,81% dan 1 sasaran pendukung terdiri dari 4 program 27 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.200.143.871,-. dengan persentase antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 85,26%.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020, menunjukan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori baik. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

- Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah" dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:
 - Indikator "Penetapan RKPD Tepat Waktu" dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020;

ii

- 2. Indikator "Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD" dengan capaian realisasi sebesar 98,16%. Indikator ini ditarget kan sebesar 30% namun realisasi capaian adalah sebesar 29,45%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain: 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD;
- 3. Indikator "Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS" dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui Program yang terdapat pada RKPD yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPD.
- Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah" dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:
 - Indikator "Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD" dengan realisasi sebesar 81,25%. Indikator ini dicapai melalui indikator sasaran Renstra OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RPJMD 2019-2024 berjumlah 39 OPD, sedangkan yang belum selaras berjumlah 9 OPD;
 - Indikator "Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD" dengan realisasi sebesar 81,25%. Indikator ini dicapai melalui indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD berjumlah 39 OPD. Adapun jumlah indikator yang tertera

- dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 berjumlah 33 yang diturunkan kedalam indikator sasaran yang terdapat pada Renja di masing-masing OPD;
- 3. Indikator "Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai" dengan realisasi sebesar 51,85% sampai dengan Bulan April tahun 2021. Indikator ini dicapai melalui indikator yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%.
- Pencapaian sasaran pendukung " Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA " dengan capaian 1 indikatornya sebagai berikut:
- Indikator "Nilai Sakip BAPPEDA" dengan realisasi sebesar 100%.
 Indikator ini dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat "BB" karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.

Disamping beberapa capaian kinerja tersebut, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Permasalahan itu adalah :

♣ Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK); namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya "keterbatasan" teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan;

- Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan schdule dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap wait and see dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.
- Memperhatikan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran (=rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pendemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (=mengurangi) jumlah output, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target output yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga diharapkan bermanfaat untuk sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Telukbetung, Maret 2021



Daftar Isi

| Kata P | engan | tar | i |
|----------|---------|---|-----|
| Ringko | ısan Ek | sekutif | ii |
| Daftar | lsi | | vi |
| Daftar | Tabel (| dan Daftar Gambar | vii |
| Bab I. | | Pendahuluan | 1 |
| | 1.1 | Dasar Hukum | 2 |
| | 1.2 | Tugas dan Fungsi | 3 |
| | 1.3 | Struktur Organisasi | 4 |
| | 1.4 | Sumber Daya Manusia | 7 |
| | 1.5 | Sarana dan Prasarana | 9 |
| | 1.6 | Sumber Pendanaan | 11 |
| | 1.7 | Sistematika Laporan Klnerja | 12 |
| Bab II. | | Perencanaan KInerja | 14 |
| | 2.1 | Renstra Bappeda 2019-2024. | 13 |
| | 2.2 | Alokasi Anggaran Tahun 2020 | 22 |
| | 2.3 | Instrumen Pendukung | 23 |
| Bab III. | | Akuntabilitas Kinerja | 27 |
| | 3.1 | Kerangka Pengukuran Kinerja | 27 |
| | 3.2 | Capaian IKU pada Renstra BAPPEDA 2019-2024 | 28 |
| | 3.3 | Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024. | 30 |
| | 3.4 | Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2020 | 37 |
| | 3.5 | Prestasi BAPPEDA yang diraih selama Tahun 2020 | 48 |
| Bab IV | | Penutup | 49 |
| | 4.1 | Kesimpulan | 49 |
| | 4.2 | Rekomendasi hasil Evaluasi Program/ Kegiatan | 49 |
| Lampir | an | | |

Daftar Jabel

| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin | 8 |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.2 | Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA | 10 |
| Tabel 1.3 | Anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2020 | 11 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024 | 17 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024 | 18 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 | 20 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 28 |
| Tabel 3.2 | Capaian IKU BAPPEDA Tahun 2020 | 29 |
| Tabel 3.3 | Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020 | 30 |
| Tabel 3.4 | Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020 | 39 |

Jaftar Gambar

| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi BAPPEDA | 6 |
|------------|---|----|
| Gambar 1.2 | Sarana dan Prasarana | 9 |
| Gambar 2.1 | Cascading Misi RPJMD s/d Renstra BAPPEDA | 16 |
| Gambar 2.2 | Pohon Kinerja BAPPEDA | 21 |
| Gambar 2.3 | Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020 | 23 |
| Gambar 2.4 | Website BAPPEDA | 24 |
| Gambar 2.5 | Website E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung | 25 |
| Gambar 2.6 | Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung | 25 |
| Gambar 2.7 | Website Geoportal Lampung | 26 |
| Gambar 2.8 | Layanan Media Sosial BAPPEDA Provinsi Lampung | 26 |
| Gambar 3.1 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 | 38 |

vii

Bab J. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2020
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53

Bab I. Berisi:

- 1. Dasar Hukum
- 2. Tugas dan Fungsi;
- 3. Struktur Organisasi;
- 4. Sumber Daya Manusia;
- 5. Sarana dan Prasarana;
- 6. Sumber Pendanaan
- 7. Sistematika LKj

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.



1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung; dan
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/ B.09/ HK/ 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah:
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



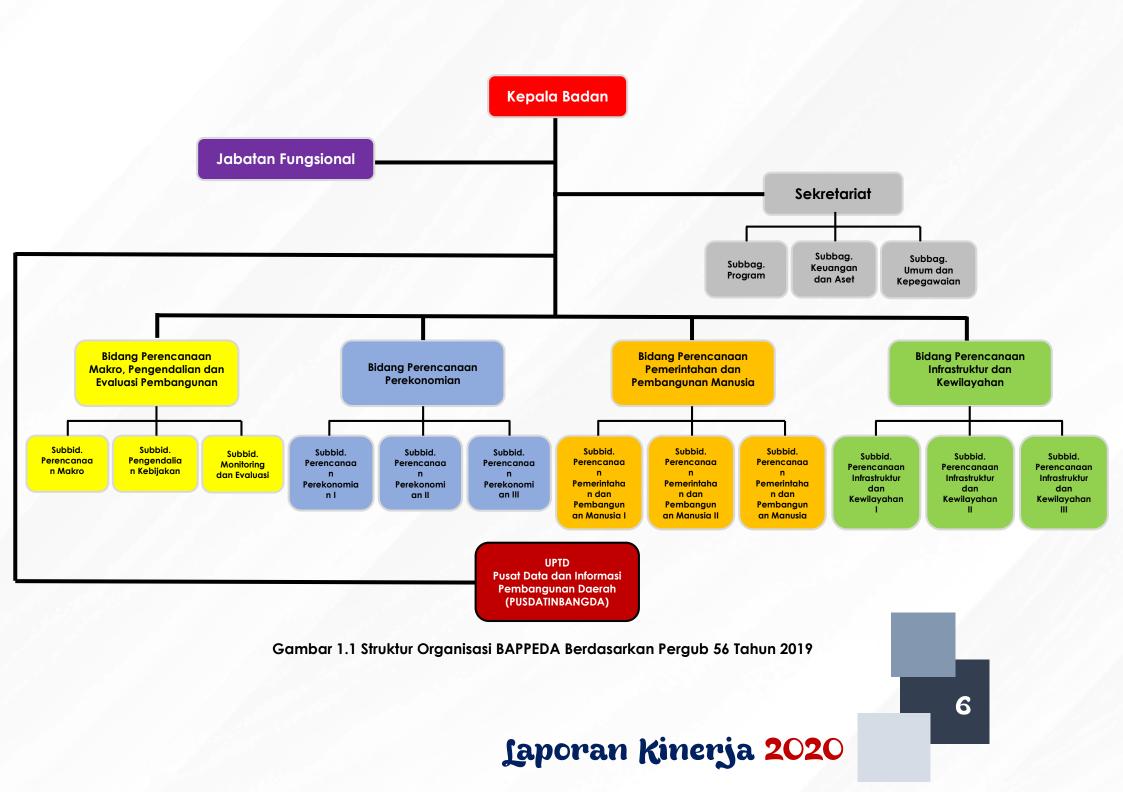
1.3 Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

- Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi;
- 3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid.
 Perencanaan Perekonomian I, Subbid. Perencanaan
 Perekonomian II, Subbid. Perencanaan Perekonomian III.:
- 4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatimbangda) terdiri dari Subbag. Tata

Usaha, Seksi Pengelolaan Data Spasial, Seksi Pengelolaan Data A-Spasial.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini :



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari 25 Jabatan Struktural, yaitu:

- a. Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, eselon III.a;
- e. Delapan Belas orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut:

Berdasarkan diagram disamping ASN Bappeda pada bulan Desember tahun GILTER 2020 berjumlah 117 orang 15,00% dengan kualifikasi ienjang pendidikan Strata II sebanyak 46 TINGKAT orang (39,32 %), Strata I dengan PENDIDIKAN jumlah ASN 43 orang (36,75 %), 4,27% ASN BAPPEDA Diploma IV sebanyak 5 orang (4,27 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,42 3,42% %), SLTA 18 orang (15%), dan SD 1 orang (0.85%)0,85%

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN dilingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II

dan Golongan I dengan rincian sebagaimana pada berikut . Dari jumlah 117 orang, Diagram Golongan III berjumlah 81 orang atau persentase 69,23 % dengan rincian Golongan III.d berjumlah 18 orang, Golongan III.c sebanyak 33 orang, Golongan III. b sebanyak 23 orang, dan Golongan III. A 8,55% sebanyak 7 orang.

Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau 21,37 % dengan persentase rincian Golongan IV.d berjumlah 2 orang,

Golongan IV.b sebanyak 5 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 18 orang.

0,85%

TINGKAT

GOLONGAN ASN BAPPEDA

Untuk Golongan II berjumlah 10 orang atau persentase 8,55% dengan rincian Golongan II d berjumlah 2 orang, Golongan II c 3 orang, Golongan II b 5 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,85 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Desember 2020, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 117 orang yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional perencana, dan 87 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut:

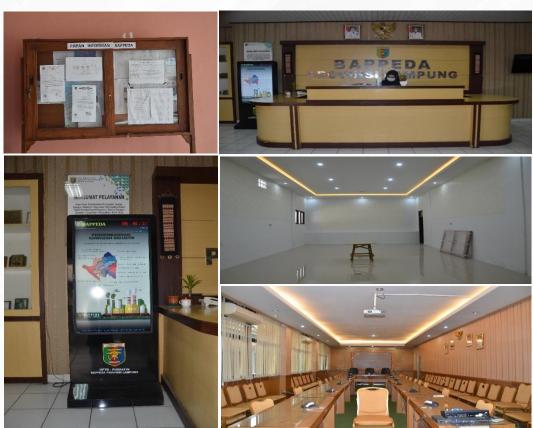
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

| Nama | Jenis | Jumlah | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| <u>Pejabat</u> | Laki-laki | Perempuan | Junian |
| Pejabat Struktural | 13 | 12 | 25 |
| Pejabat Fungsional | 2 | 3 | 5 |
| Perencanaan | Z | 3 | 3 |
| Fungsional Umum/Pelaksana | 48 | 39 | 87 |
| TOTAL | 63 | 54 | 117 |
| PERSENTASE | 54% | 46% | 100 |

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu mengingkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di Bappeda

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung di Bappeda

| NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE | TAHUN | JUMLAH |
|----|---------------------|------------------------|-------|---------|
| 1. | Gedung Kantor 3 Lt | - | - | - |
| 2. | Ruang Rapat | | | |
| | - Ruang Rapat Lt. 1 | 7 | - | 1 Ruang |
| | - Ruang Rapat Lt. 1 | | - | 1 Ruang |
| | - Ruang Rapat Lt. 3 | | | 1 Ruang |
| | - Ruang Rapat Kecil | | | 6 Ruang |
| 3. | Perpustakaan | - | | 1 Ruang |
| 4. | Kendaraan Roda 4 | | | |
| | - Fortuner | Toyota | 2020 | 1 unit |
| | - Hi Lux | Toyota | 2015 | 1 unit |
| | - Minibus/Rust | Toyota | 2014 | 1 unit |
| | - Minibus/Avanza | Toyota | 2014 | 1 unit |
| | - Minibus/Avanza | Toyota | 2014 | 1 unit |
| | - Minibus/Avanza | Toyota | 2004 | 1 unit |
| | - Minibus/Avanza | Toyota | 2004 | 1 unit |
| | - Suzuki APV | Suzuki | 2007 | 1 unit |
| 5. | Kendaraan Roda 2 | 27 / 18 | | |
| | - Sepeda Motor | - Yamaha MX | 2014 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda C. 100 | 1996 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda NF125 SD | 2006 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda MCB | 1997 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda GL MAX | 1997 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Suzuki | 2005 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda NF125 SD | 2006 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda C.86 | 1996 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Yamaha RX-S | 1996 | 1 unit |
| | - Sepeda Motor | - Honda C. 100 | 2002 | 1 unit |
| 6. | Sarana Pendukung | | | |
| | - Komputer | Bermacam merk dan type | | 66 unit |
| | - Note Book | Bermacam merk dan type | | 51 unit |
| | - Printer | Bermacam merk dan type | | 70 unit |
| | - Camera | Bermacam merk dan type | | 15 unit |
| | - Handycam | Bermacam merk dan type | | 8 unit |
| | - LCD | Bermacam merk dan type | | 10 unit |
| | - Televisi | Bermacam merk dan type | | 20 unit |
| | - Sound System | Bermacam merk dan type | | 5 unit |

| NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/TYPE | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------------------|------------------------|-------|---------|
| | - Wireless | Bermacam merk dan type | | 5 unit |
| | - Scanner | Bermacam merk dan type | | 6 unit |
| | - AC | Bermacam merk dan type | | 51 unit |
| | - GPS | Bermacam merk dan type | | 3 unit |
| | - Spinning Bike | | | 1 unit |
| | - Treadmill | | | 1 unit |
| | - Sit Up Bench | | | 1 unit |
| | - Power Rider | | | 1 unit |
| | - Tablet Note | Bermacam merk dan type | | 8 unit |
| | - Lemari Es | Bermacam merk dan type | | unit |

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2020, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari APBD Provinsi Lampung dan APBN dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2020 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2020, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 25.038.524.140,- terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 12.590.979.950,-
- Alokasi dana APBN sebesar Rp. 555.717.000

Tabel 1.3 Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

| Sumber Dana | Besar Anggaran (Rp) | Persentase (%) |
|--------------------|---------------------|----------------|
| APBD | 25.038.524.140 | 96,81 |
| - Belanja Langsung | 12.590.979.950 | |
| APBN | 555.717.000 | 3,19 |
| Total | 25.864.241.140 | 100 |



1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2020 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1 Renstra BAPPEDA 2019-2024

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi
Lampung adalah merupakan dokumen yang
disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran
dari pada visi dan misi kepala daerah yang
terpilih dan terintegrasi dengan potensi
sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah

Bab II. Berisi:

- Penjelasan Visi Misi KDH 2019-2024;
- 2. Tujuan, Sasaran, Indikator;
- Penjelasan IKU BAPPEDA 2019-2024;
- 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
- 5. Rencana Anggaran;
- 6. Instrumen Pendukung

yang bersangkutan. Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :



Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan

daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata.

Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi yang dicita-citakan. Selanjutnya misi Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut:

6 Misi

Untuk Provinsi Lampung 2019-2024

Gubernur Arinal menyampaikan 6 misi untuk Provinsi Lampung dalam 5 Tahun kedepan. Keenam Misi ini diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.



B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik" dengan Sasaran RPJMD yaitu "Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah".

MISI 2

"Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"

"Nilai SAKIP"

TUJUAN BAPPEDA

Mewujudkan
perencanaan dan
evaluasi pembangunan
daerah yang berkualitas
(menjawab permasalahan
dan mendorong

SASARAN 1 BAPPEDA

Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

SASARAN 2 BAPPEDA

Meningkatnya kualitas substansi dan implementas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

SASARAN 3 BAPPEDA

Meningkatnya kapasita dan kinerja instansi RAPPEDA

Gambar 2.1 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA



Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

| No | Tuiuan | Sasaran | Indikator | | | Target | | |
|----|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tujuan | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | ke- 2: "Mewu | | • | e" untul | k menin | gkatkar | n kualita | ıs dan |
| | nerataan pela | | | | | | | |
| 1. | Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah. | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | daerah). | | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD; | 30% | 30% | 30% | 31% | 32% |
| | | | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai. | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024

Pada RPJMD 2019-2024, BAPPEDA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala BAPPEDA untuk periode 2019-2024. IKU tersebutlah yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target per tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 2019-2024

| | | | | | PENJELASAN | |
|----|---|---|----------------|---|--|--|
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah; | Waktu Penetapan RKPD | Tepat Waktu | Ketepatan waktu dalam penyusunan RKPD. | Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan | Pergub tentang RKPD setiap tahun |
| | | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD; | % | Usulan dari Stakeholder yang menjadi salah satu point penting dalam penyusunan RKPD yang diakomodir. | Dihitung berdasarkan Usulan Stakeholder sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan Stakeholder yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen. | Berita Acara Desk Musrenbang RKPD |
| | | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS. | % | KUA-PPAS merupakan dokumen penganggaran yang penyusunannya harus berpedoman kepada RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Maka konsistensi antara program pada KUA-PPAS dengan program pada RKPD menjadi sangat penting. | Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator Renstranya selaras dengan RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen. | 1. Renstra OPD dan Perda RPJMD; 2. Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung; 3. KUA/ PPAS Provinsi Lampung |
| 2. | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras | % | Indikator sasaran renstra OPD harus selaras dengan indikator Sasaran RPJMD | Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras | Renstra OPD dan Perda RPJMD |

| | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | | PENJELASAN | |
|----|--|---|--------|--|---|--|
| NO | SASARAN STRATEGIS | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| | dan evaluasi pembangunan daerah. | dengan indikator sasaran RPJMD; | | agar capaian kinerja KDH dapat terpenuhi | dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen. | |
| | | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | % | Indikator sasaran renja OPD harus selaras dengan indikator Sasaran RKPD agar capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Kepala OPD dapat terpenuhi | berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan RKPD yang masuk dalam KUA PPAS dibagi Jumlah | Pergub RKPD dan Renja OPD |
| | | Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai. | % | Target dan kebijakan yang dimuat dalam RPJMD memerlukan analisis kebijakan yang implementatif dan parsial guna mencapai target-target yang disusun harus berorientasi pada manfaat yang diperoleh dari analisis tersebut | Dihitung berdasarkan Jumlah Indikator sasaran RPJMD yang tercapai dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen | 1. Perda RPJMD; 2. Capaian evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung. |

D. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah; | Waktu Penetapan RKPD | Tepat Waktu (100%) |
| | | Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD; | 30 |
| | | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS. | 100 |
| 2 | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | 100 |
| | | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | 100 |
| | | Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai. | 80 |

Tujuan:

Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah)

Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator Sasaran

Penetapan RKPD Tepat Waktu

Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD

Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS

5 Program/ 29 Kegiatan

Program Perencanaan, Evaluasi erah Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

> Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota

Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan

Indikator Sasaran

Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD

Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD

Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai

egiatan 4 Program/ 27 Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat

1 Program/ 5 Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah



3 Sasaran

10 Program

61 Kegiatan

Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA

21

2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Bappeda melaksanakan 10 Program dan 61 Kegiatan, sebagimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2020, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2020 alokasi anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 20.815.921.000,-(Dua Puluh Miliyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14
 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD T.A. 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, Bappeda melaksanakan 10 Program dan 61 Kegiatan telah ditetapkan alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.590.979.950,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

2.3 Instrumen Pendukung

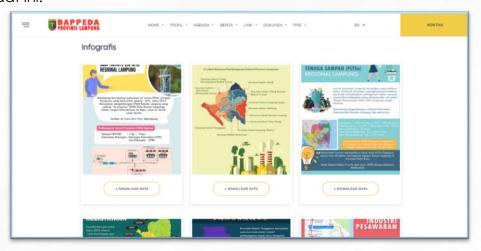
Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Lampung. BAPPEDA Provinsi Lampung selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.



Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA Provinsi Lampung membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

a. Website BAPPEDA

BAPPEDA mempunyai wadah informasi berupa Website yang dapat diakses di alamat www.bappeda.lampungprov.go.id. Website ini memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini pula BAPPEDA memberikan ruang kepada OPD untuk dapat konsultasi melalui bar "Klinik Perencanaan", serta website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan informasi dan Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini.

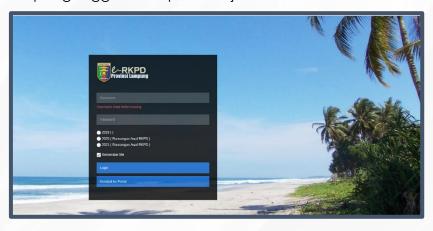


Gambar 2.4 Website BAPPEDA Provinsi Lampung

b. Sistem Informasi Perencanaan (E-RKPD)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung melalui BAPPEDA membuat sebuah aplikasi E-Planning dan dapat diakses dapat diakses menggunakan

website E-RKPD dengan alamat http://erkpd.lampungprov.go.id. E-Planning tersebut telah terintegrasi dengan E-Budgeting yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Lampung. Diharapkan dengan aplikasi E-RKPD dan E-Budgeting tersebut konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan.



Gambar 2.5 Website E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung

c. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan (SIMONEV) dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.6 Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung

d. Sistem Informasi Geoportal Lampung

Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem.



Gambar 2.7 Website Geoportal Lampung

e. Layanan Informasi Media Sosial

Pada Tahun 2020 BAPPEDA telah memiliki layanan informasi melalui 3 aplikasi yang sedang banyak digunakan oleh khalayak ramai untuk mempermudah. 3 aplikasi tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram.



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab III. Berisi:

- 1. Kerangka Pengukuran;
- 2. Capaian IKU 2019-2024;
- Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
- Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2020;
- Prestasi BAPPEDA yang
 Diraih Selama Tahun
 2020.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode Warna |
|----|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah | |

3.2 Capaian IKU pada Renstra 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN | REALISASI TINGKAT CAPAIAN | % | KETERANGAN |
|-----|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| J | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah; | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100% | Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan. |
| | | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD: | 30% | 29,45% | 98,16 % | Memperhatikan keselarasan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS; | 100% | 100% | 100% | Target telah tercapai dimana program/kegiatan KUA-PPAS yang telah konsisten terhadap program/kegiatan dalam RKPD 2021 |
| II | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | 100 % | 81,25% | 81,25 % | Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD. |
| | | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | 100 % | 81,25% | 81,25 % | Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renja nya terhadap RKPD 2021. |
| | | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai. | 80% | 51,85% | 64,81 % | Pengukuran terhadap capaian 27 indikator sasaran RPJMD (80%). Hasil nya sampai dengan Bulan April Tahun 2021 terdapat 14 indikator yang telah mencapai target yang direncanakan. |

Dari 6 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 2 indikator, 3 indikator lainnya masing-masing mencapai nilai 98,16% dan 81,25%, serta 1 indikator dengan capaian 57,68%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020

| NO | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| 2. | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD; | % | 30 | 29,45 | 98,16 |
| 3. | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS; | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | % | 100 | 81,25 | 81,25 |
| 5. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | % | 100 | 81,25 | 81,25 |
| 6. | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai. | % | 80 | 51,85 | 64,81 |

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi: Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan sewilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu:

- Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;
- 3. Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan **RKPD Provinsi Lampung** sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020.



Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders kewenangan sesuai diakomodir yang dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 29,45 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 98,16%.



Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain: 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD



Indikator 1.c adalah Konsistensi Persentase Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA **PPAS** dengan target kinerja sebesar 100%. Pada 2020 Program tahun terdapat pada yang RKPD yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPD. Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1.c sebesar 100%. Hal ini karena dalam penyusunan rencana tahun 2020 sudah menggunakan

aplikasi E-RKPD untuk perencanaan serta aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) untuk keuangan sehingga tidak dimungkinkan OPD memilih kegiatan diluar menu kegiatan yang sudah diinput di sistem informasi.

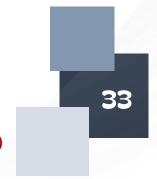
Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 1 antrara lain :

- Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Substansi usulan program/ kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- Volume usulan belum disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- Data dukung dari usulan program/ kegiatan belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan peran aktif stakeholder pembangunan kiranya dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penyampaian usulan kepada Stakeholder terkait.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :



- Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
- 2. Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
- 3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80%.



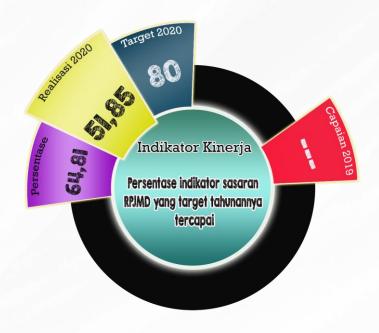
Indikator sasaran 2.a adalah Persentase indikator OPD yang Renstranya sasaran dengan selaras indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap

target sebesar 81,25%. Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target



sebesar 81,25% Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renja nya terhadap RKPD 2021.



Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja 80% sebesar atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi nya sebesar 51,85 %

dengan total indikator yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator sampai dengan Bulan April tahun 2021, sedangkan terdapat 13 indikator

belum mencapai target yang direncanakan Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.c sebesar 64,81%.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 2 antrara lain :

- Belum selaras nya indikator Renstra OPD dengan 33 indikator pada RPJMD 2019-2024;
- Dikarenakan Renstra OPD belum selaras dengan indikator RPJMD 2019-2024, maka hal tersebut berdampak pula dengan RKPD dan Renja OPD yang merupakan rencana tahunan nya;
- Target yang ingin dicapai pada 33 indikator kinerja pada RPJMD 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan yang berdampak pula pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah dan capaian target pembangunan daerah.

Untuk menyelesaikan hambatan diatas, maka dilaksanakan tindak lanjut yaitu :

- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua OPD dalam melakukan penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat "SMART":
- Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah.



Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin diukur yang melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPFDA dalam tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi. keuangan serta asset. Target



indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat "BB". Adapun realisasi kinerja nya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2020

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 melaksanakan 10 Program dan 61 Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020. Anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD sebesar Rp. 12.590.979.950,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.492.003.500,dan Sasaran Pendukung Rp. 6.098.976.450,-. dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 10.251.559.641,-



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 97,14% dengan 53 kegiatan yang mencapai 100% dan 8 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 50 %.

Untuk 4 Sasaran Utama terdiri 6 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.492.003.500,- dengan realisasi sebesa Rp. 5.051.415.770,- dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 4 program 27 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.200.143.871,-. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya realokasi dan refocussing APBD sebagai dampak Covid-19.



Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

| No | Saggran | In eliterates | | Kinerja | | Ar | nggaran (Rp) | |
|-----|---|---|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-------|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | | (5) | |
| 1. | MRAN UTAMA Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 | 854.675.000 | 635.425.500 | 74,35 |
| | daerah. | Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD. | 30% | 29,45% | 98,16% | | | |
| | | Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS | 100% | 100% | 100% | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD | 100 | 81,25 | 81,25 | 5.637.328.500 | 4.415.990.270 | 78,33 |
| | | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD | 100 | 81,25 | 81,25 | | | |
| | | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai | 80 | 30,3 | 37,87 | | | |
| | RAN PENDUKUNG | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA | Nilai SAKIP | BB | BB | 100 | 6.098.976.450 | 5.200.143.871 | 85,26 |
| | | TOTAL | | | | 12.590.979.950 | 10.251.559.641 | 81,42 |

Pada tabel diatas dapat dilihat pada Sasaran Utama tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Pendukung yaitu 85,26%, Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran ke-1

yaitu 74,35%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah



I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Jumlah dokumen RKPD Murni dan RKPD Perubahan dengan tingkat capaian 100 %;
- Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah

 Pelaksanaan
 Forum
 Gabungan OPD
 dan
 Musrenbang
 dengan tingkat
 capaian 100%;



5. Jumlah laporan Hasil Koordinasi terkait isu permasalahan dan indikator sosial ekonomi pembangunan di Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.



Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

- Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan dan Tahunan) dan Dokumen hasil FGD di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Dokumen Maket Intellegen dan hasil FGD di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 50%;
- 4. Jumlah Laporan hasil koordinasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan tingkat capaian 100%;

- Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
- 7. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 100%.

II. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Jumlah Dokumen Roadmap IPM dan Dokumen Proceeding FGD di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Dokumen RAD PG 2020-2024 dan Dokumen Proceeding FGD di Sektor Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;
- 3. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di sektor Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
- 4. Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project "Smart Village" dengan tingkat capaian 100%;
- 5. Jumlah Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tingkat capaian 100%;

- 6. Jumlah Dokumen LP2KD, Dokumen Laporan Germas, dan Laporan RAD PG 2020-2024 dengan tingkat capaian 66,67%;
- Jumlah Dokumen Laporan capaian TPB/SDG's Tahun 2019 dan Dokumen RAD TPB/SDG's Tahun 2020-2024 dengan tingkat capaian 100%;

III. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Jumlah laporan koordinasi dan dokumen analisis kebijakan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah draft dokumen laporan kebijakan KLHS untuk Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Revisi RTRW Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Dokumen laporan hasil kajian kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 50%;
- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;
- 5. Jumlah Dokumen Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi dengan tingkat capaian 100%;

- 6. Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
- 7. Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi pelaksanaan program IPDMIP yang jadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

IV. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota

- 1. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dengan tingkat capaian 100%;
- 2. Jumlah dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
- 4. Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring dengan tingkat capaian 100%.

V. Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan

- Jumlah informasi Geospasial Tematik dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book dengan tingkat capaian 100%;
- 3. Jumlah keterisian E-Database dan Siskurtanas dengan tingkat capaian 92,50%;
- 4. Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

чч

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.



I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
- 2. Jumlah layanan administrasi keuangan dengan tingkat capaian 100%;
- 3. Jumlah layanan kebersihan kantor dengan tingkat capaian 100%;
- 4. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
- 5. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
- 6. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;

- 7. Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
- 8. Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
- 9. Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan tingkat capaian 100%;
- 10. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
- 11. Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan tingkat capaian dengan tingkat capaian 89,50%;
- Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%;
- 13. Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 100 %;
- 2. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %;
- 3. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %;
- 4. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12 %;



5. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %.





III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

- 1. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi dengan tingkat capaian 86,67 %.
- Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan dengan tingkat capaian 97,92%;
- 3. Jumlah pelayanan informasi publik dengan tingkat capaian 100%;
- 4. Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda dengan tingkat capaian 98,00 %.

IV. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah

- Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ) dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD dengan tingkat capaian 100%;
- Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi) dengan tingkat capaian 100 %;
- 4. Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Bappeda dengan tingkat capaian 100 %;

5. Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset dengan tingkat capaian 100 %.

3.5 Prestasi BAPPEDA yang Diraih Selama Tahun 2020

a. BAPPEDA tahun 2021 meraih Penghargaan Tjindarboemi sebagai Instansi Inovatif Tahun 2020 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung;



b. BAPPEDA Provinsi
 Lampung pada tahun
 2020 mendapatkan
 Peringkat 2 (Dua)
 Anugerah Keterbukaan
 Informasi Publik Tahun



2020 untuk Kategori Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung;

c. BAPPEDA tahun 2020 menjuarai peringkat 3 dalam Lomba Media Sosial tingkat OPD Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2020.



Bab IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bab IV. Berisi:

- 1. Rekomendasi;
- 2. Kesimpulan
- Capaian Sasaran 1 yang terdiri 3 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 99,38% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 74,35%;
- Capaian Sasaran 2 yang terdiri 3 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 73,39% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 78,33%;
- Capaian Sasaran 3 (pendukung) terdiri 1 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 85,26%.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua OPD dalam melakukan penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat "SMART";
- Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah;
- 3. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus

mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

- Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
- 5. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan baseline dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
- 6. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
- 7. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan subtantif.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



Sampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama, **GUBERNUR LAMPUNG, KEPALA BAPPEDA**

PROVINSI LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN I APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-----------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah. | Penetapan RKPD Tepat Waktu; Persentase usulan stakeholders yang | Tepat Waktu 30% |
| | | diakomodir dalam RKPD; Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS. | 100% |
| | 1.1 Meningkatnya kualitas data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalinan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai peraturan perundang- undangan | Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu | 100% |
| 2. | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstra-nya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | 100% |
| | monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD; | 100% |
| | | Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai. | 85% |
| | 2.1 Meningkatnya keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan antara RKPD dengan RPJMD. | Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah | 100% |
| | 2.2 Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% |

| | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | <u>Keterangan</u> |
|----|--|----------------|-------------------|
| 1. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 2.545.497.400 | APBD |
| | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.087.946.500 | APBD |
| | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 836.126.000 | APBD |
| | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 621.424.900 | APBD |
| 2. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.337.148.100 | APBD |
| | • Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1.413.505.500 | APBD |
| | • Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 1.071.472.600 | APBD |
| | • Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1.852.170.000 | APBD |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 23.848.419.682 | APBD |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 341.892.000 | APBD |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.035.221.132 | APBD |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 295.322.600 | APBD |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6.152.399.600 | APBD |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 129.213.000 | APBD |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.012.917.000 | APBD |

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

Keterangan

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 881.454.350

APBD

Jumlah

30.731.065.182

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG,

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN II APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | Tersusunnya dokumen | Jumlah dokumen hasil | 1 Dokumen |
| | hasil fasilitasi dan | fasilitasi dan koordinasi | |
| | koordinasi terkait | terkait Dekonsentrasi | |
| | Dekonsentrasi Bappeda | Bappeda Provinsi | |
| | Provinsi Lampung | Lampung | |
| 2. | Tersusunnya dokumen | Jumlah dokumen hasil | 1 Dokumen |
| | hasil koordinasi terkait | koordinasi terkait | |
| | hubungan kerjasama | hubungan kerjasama | |
| | antara Pemerintah Pusat | antara Pemerintah Pusat | |
| | dan Daerah | dan Daerah | |

| | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | <u>Keterangan</u> |
|----|--|------------------------------|-------------------|
| 1. | Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 1.111.434.000 | APBN |
| | Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang | 1.111.434.000 |) APBN |
| 2. | Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa | 330.000.000 | APBN |
| | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 330.000.000 |) APBN |
| | Jumlah | 1.441.434.000 | |
| | | Telukbetung, | Januari 2021 |
| | Pihak Kedua, | Pihak Pertama, | |
| | GUBERNUR LAMPUNG, | KEPALA BAPPE PROVINSI LAM | |

ARINAL DJUNAIDI

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya NIP. 19670517 199303 1 011

CASCADING RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

| | RPJMD | | | _ | | _ | | _ | | | | | | | | | REN: | STRA BA | PPEDA | 2019-2024 | | | | | | | _ | _ | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------|--|----------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------|-----------|--------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|---|--|---|------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| NO MISI TUI | | ARGET SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Ι. | NDIKATOR KO | TUJUAN NDISI TARGE | ттн | | SASARAN | | SASARAN A SATUAN | TARGET | NAMA | SASABAN | INDIKATOR | | | PROG | RAM . | | | ANGGARAN | | | | | | | EGIATAN M | | | ANGGARAN | |
| 1 2 | , , | 5 6 | | TUJUAN I | NDIKATOR KOI TUJUAN A | WAL KE 10 1: | FORMULA 12 | SATUAN 13 | 14 | INDIKATOR FORMULI SASARAN FORMULI | 2020 2 | 221 2022 2022 18 | 3 2024 PROGRA | SASARAN PROGRAM 20 | INDIKATOR PROGRAM | FORMULA 22 | 2020 2021 | 2022 2022 | 3 2024 | 2020 24 | 2021 00 1.529.000.000 | 2022 25 | 2023 20 | NAMA KEGIAT M 26 290,000 Pervusualen den Pin | | N INDIKATOR KEGIATAN | | 21 2022 2 29 2 2 | | 2020 wn 300,000,000 | 2021 330,000,000 | 2022 31 363,000,000 | 2023 2024 |
| 3 Menedjudkan Menedjudkan Tata Ki Governancia Plantik Untuk | udikan Mikili Aleformiasi delota Berckossi Prizikasi Irizahan | A Maningkatnya akuntahilitas kesangan dan akuntahilitas kinerya | Nilai SAKIP 96 pi di di bi | | ntapan RKPD in with Walktu | n/a Yopat t | Waldsu Pemetap RKPD Makisma mingga sastala RKP ditetapkan | iam Tepat Waktu ii 1 | Meningkatnya kualitas proteis premcamain pembangunin diarah. | Persitigian RSPO Wildata Persiti Tepat Walas RSPO Halasi mingga satela RSP distripka | geam Yepat Wildru Wildru Weldru Wildru Wildr | Pepat Tepat Tepa Wlaktu Waktu Waktu | t Yepat Program Waltu Waltu Perencanana Daerah | Terlaksananya Penenchan didaumen perencanaan perencanaan diserah | Persentase dokumen premicanian permengunan daerah yang tapat waktu | Juntah diskumen pemenjapaan daerah yang dasaun ohih BAYPEDA dibaj Juntah dekumen pemerunaan pemengunan daerah yang distapkan dengan pestibusan pestibusan pestibusan 100% (2/2 x 100%) | 100 100 | 100 100 | 100 | % 1,740,000.00 | 1.529.000.000 | 1.881,900.000 1 | 850.090.000 2.035 | 299.000 Penyssanan dan Pre RESPD | etapak (manunya dalumen BODO Menri dan BISTO Perubahan | Jumish dekamen ROPO Mumi dan Perubahan | 2 1 | 2 2 | 2 2 Dolean | 300,000,000 | 330.000.000 | 363.000.000 | 399.300.000 439.230.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peryusaran dan Per KUA dan PPRS | etapan Tensusunya dokumen XLIA/PPAS Mumi dan Perubahan | Jumish dokumen KUA/PPAS murri dan perubahan | 4 (| 0 0 | 0 0 Doku | nen 200.000.000 | 0 | 0 | 0 1 |
| | | | | | sentase usulan telholders sall senangan yang senedir dalam (O; | 32 | Usulan Salasholder sessai dengan konvenangan yang diakomor di ROPD dibagi Jamitah seluruh Ukulan Salasholder ya sessai konvenangan dikali 100 | tir ing | | Persentaine usukan Stakerbiders sesuasi Kawenungan yait Kawenungan yait B39°D; diapan Sukerbiders Jamilah selatu Sukerbiders sesuai dengan Jamilah selatu sesuai sukerbiders sesuai dengan Jamilah selatu sesuai kawenangan dikali 100 Per | % 30 | 30 30 31 | 32 | | | | | | | | | | | | aan Terlikisananya pembinan terkait Perencanaan OP | | 49 4 | 49 | 49 49 CF | 690,000,000 | 715.000,000 | 193.600.000 786.500.000 | 212.990.000 234.256.00 885.150.000 951.665.00 |
| | | | | Per Kor Pro Kag den Kag PPS | sientzinie nisistensi gram/ jatam RSPD gian Program/ jatam KUA SS; | 100 | No Jumlah OPD yang memiliki Indikater Rentstranya selaras dengan RPIND dibagi Jumlah OPD Ingkup Provin Langung dikal NA Research | | | Persentase Jones John John John John John John John John | % 1000 1 | 100 100 | 100 | | | | | | | | | | | Porum Gabungan 38 dan Musembarg Pro Koordinasi Ragional Perbangunan Asta Wilayah Provinsi | PD Terlaksananya Forpab G dan Munembang Tersusunnya laporan ha fasilitasi forum-forum permonanan, koordinasi komsultasi dan sirkonia palaksanan koordinasi | DO Jumith Pelaksunaan Forgis O'D dan Muserebang all Jumith laponer hael keondinaal berkalt isu permasalahan dan permasalahan dan jumithan dan jumith | 1 1 | 1 1 | 2 2 Ki | 550,000,000 | | 423.500.000 | 951.865.000 951.865.000 465.850.000 512.435.000 |
| | | | | | | | | | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi pembanaran monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentane CPD Jamish CPD yang indikater page memilik can disperation of the page memilik can disperation of the page of the p | % 100 1 | 100 100 100 | 100 Program Perencianain, Eviluais Kine dan Pengerabang Kidipilan Pembangunan Benorei | Tercapainya Keselarasian ja Dokumen Pierncanaan OPD Lingkup Bidang Ekonomi dengan RPIPNO dan BOPD dan BOPD | Persentase kessicalian hasil eokkaal capalan indikater kinerja sasiaran tahunan 873MD dengan kegilatan pada Ramstra dan Ramja OPD bidang ekonomi | Capalan indikator sasanin makro elonceri pada 1923MD dibagi tanget indikator 893MD dikali 100 % | 200 200 | 100 100 | 0 100 | % 2.700.000.00 | 00 1.980.000.000 2 | 2.178.000.000 2. | 395.800.000 2.635. | 80.000 Perencanian, Koord dan Analisis/Kejian Kebijakan Pembangs Petanian | pangembangan ikorom dan hinaja kirjain, kosangan, kerjasama d inveestasi Tensasannya dokumen di sistor pertanian, pangan, kalautan dan perikanan | in FCD Jurnish dokumen (Laponen haisi koordeasi) verifikasi peryususan renaba dan renja OPD, dokumen analisi/kajian lebipikan pembangunan sektor pertainan, parjam, kelautan dan perikanan | 2 1 | 2 2 | 2 2 Dokus | 350,000,000 | 385.000,000 | 423.500.000 | 465.850,000 512.435.00 |
| | | | | | | | | | | Jamish OPO Ingkup Provis Lampung diku 100 Persen. Persentase OPO yang indikator saisaran Renja rya salara dengan indikator saisaran Mani RUAN PI molkator saisaran RUND; Prognam/Keja n KUA PROS dikia 100 Persen. | | 100 100 100 | | | Renstra dan Renja OPD bidang skonomi | | | | | | | | | Penencanian, Koord dan Analisis/Kejian Kebijikan Pembanga Investasi dan Kesan | Tensusunnya Buku Stat Pendennenian Dokumen hasi PCID di sektor jan panlahaman modul, ten krija, tensmigasi, dan | kelastan dan perikanan selah Jamish dokumen Laporan hasil keordinasil verifikasi penyasuan Renatra den paga Reniya IPO serta dokumen analah Jojah sebigikan pembangunan di seloto pembangunan di seloto pembangunan modil, tenaga kerja, bahumipusi, dan kesangunan | 2 1 | 2 2 | 2 2 Dokus | nen 350,000,000 | 385.000.000 | 423.500.000 | 465.850.000 512.435.00 |
| | | | | | | | | | | Persentase indicator salatana per terupa ter | | 85 90 95 | 95 | | | | | | | | | | | Perencanaan Koordi dan Aradisis/Kejian Kebijakan Pembangi Industri, Perdagangi Parkvisida, Kopensi | | | 3 3 | 3 3 | 3 3 Dokus | 350,000,000 | 385.000,000 | 423.500.000 | 465.850.000 512.435.00 |
| | | | | | | | | | | RPJMD dikali Pirpsim | 100 | | | | | | | | | | | | | 0.04 | dan pendagangan Layaan Terisasannya dokuman DMO) Japona hadi boripa (dokuman Jaya Katu Patani Boripa (do | minengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan | 1 0 | 0 0 | 0 0 Doku | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Eval Capalan Kinerja Pembangunan Perta | iasi Tensasannya dokumen Monav dan capalan kin sian di saktor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan | Jumlah dokumen (Laponan irja hasil menitoring dan esaluasi program unggulan OPD) di saktor pertenian, pangan, kelautan dan perikanan | | 1 1 | 1 1 Doku | 250,000,000 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 366.025.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Eval capalan kinerja Perbangunan Ekon Makos, Investasi dar Kesangan Monitoring dan Eval capalan kinerja Perbangunan Indus Perbangunan Indus Perbangangan dan Parkasangan dan | | Jumilah dokumen (Laporan riya hali menihoring dan esahasai propriam unggulan OPO) di sektor penanaman gan modal, tenaga kerja, transmignasi, dan kesargain Jumilah dokumen (Laporan riya hali menihoring dan esahasai propriam unggulan esahasai propriam unggulan | | 1 1 | 1 1 Doku | 250,000,000 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 366.025.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Program Perencinain | Yercapainya kasolarakan antan | Persentase a kesesualan hasil | Capalan Indikator sasaran bidang | 100 100 | 100 100 | 0 100 | % 3.250.000.00 | 00 2.200.000.000 2 | 2.420.000.000 2. | 662.000.000 2.928. | | dan perdagangan | | | 2 2 | 2 2 Doku | 550,000,000 | 0 605.000.000 | 665.500.000 | 732.050.000 805.255.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Program Perencinaian Evaluasi Kiner dan Pergembangai Kobijakan Pembangan Pembangan Pembangunar Pembangunar Marassia | ja dokumen pierincanian OPD Lingkup Bidang Pemeintahan dar Pembangunan dan Marusia dengan RPEMD dan RKPD | Persentase a konsocialen hasif ovahasii capalien indikater kinerja sasaran tahurain 19/3MD dengin kegiatan pada rensta dan nerja Obje. bidan persentahan dan Persentahan dan Persentahan manusia | Capalan indikator sasalan bidang sasalan bidaya pada RPJMD dibagi Tangat indikator RPJMD dikali 100 % | | | | | | | | | Institution of the control of the co | pembangunan jid sakoo Pembangunan Sumberdaya Manusia | | 2 | 2 2 | 100 Mar. |) 36 mm | 435 600 000 | 495 890 000 E11 435 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perencahalan, Roordi dan Aradisin/Kejan Kebijakan Pembangi Kesejahtenain Rakya | Tensasunnya dokumin PG 2026-0024 dan PG 2026-0024 dan Dokumin Prosesding FG di Saktor Kesejahtaraan Rakyat | RAD Jurnish dokumen (Laponen hasil koordinasi/venfikasi CD partyusurian Renstra dan Rensja OPD, dokumen analisisi/kajira kebipikan pembangunan) di Sektor Kesejahturaan Rakyat | 2 2 | 2 | 2 Doku | 390,000,000 | 300.000.000 | 423.980.000 | 512.435.00 |

| | | | | | | | TUJUAN | | | | | SASARAI | N . | | | | | | | | PI | ROGRAM | | | | | | | | | KEC | EATAN | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|---|-------------------------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|----|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|----------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------|------------------|---------------------|---|--|---|----------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| NO MISI | TUJUAN | INDIKATOR TARGET TUJUAN | | INDIKATOR SASARAN TU | UAN INDIK | ATOR KON | IDISI TARGET | TTH FORMUL | ULA SATUAN | SASARAN | | FORMULA SA | TUAN 2020 20 | TARGET 2021 2021 20 | 23 2024 | NAMA : PROGRAM : | | | FORMULA | 2020 202 | TARGET KINER3. 21 2022 : 23 | A 2023 2024 | SATUAN 2 | 120 2021 | ANGGARAN 2022 | 2023 2 | NAMA KEGIATA | N SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATA | 2020 202 | TARGET KINERJA | SATU | N 2020 | 2021 | ANGGARAN 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 5 | | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | Perencanaan, Koordi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangu Pemerintahan | | Jumlih dokumen (Laponi hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen aralisis/kajian kebjakin pembangunan) di saktor Pamerintahan | 2 2 | 29 | | sin 350,000,00 | | | 465.850.000 | 12.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pliot Project Pemban "Smart Village" | unan Terlaksananya desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project "Senar Villana" | | | 0 | 0 0 Des | 1,250,000,00 | | 0 | 0 | - 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Evalu capalan kiterja Pershangunan Sumb Nanusia | onen Terleksaranya desa yang difailitasi sebagai Pilot Bosker Nesset Villauri Si Terssaranya dolumen pelaporan hasi pelaksana daya kajatan di selder pendidikan dan kobudayan, kepemudian din olahrapa, perpastikhan, keneradakan dan pencatatan sipil | Jamish dokumen (Lapora in hasil monitoring dan esaksasi program unggula OPO) di sektor pendidikar dan kebudayaan, kepemudian dan olahragi perpustakaan, keseripan, in administrasi kependuduka dan pencatatan sipil | 1 1 1 | 1 | 1 1 Dokur | 250,000,00 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.790.000 | 6.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Evalu capalan kinerja Pembangunan Kesejahtenain Rakyal | si Tersusunnya LP2KD, Dokumen Laporan Germa dan Laporan RAD PG 202 2024 | Jumlah dokumen (Lapona hasil monitoring dan benaluasi program unggula OPO) di Saktor Kesejahtenaan Rakyat | 1 1 | 1 | 1 1 Dokur | 250.000.00 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.790.000 | 36.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Evalu capalan kinerja Pembangunan Pemerintahan | si Tensusunnya Dokumen Laporan capalan 198/ SDG's Yahun 2019 dan Dokumen RAD 198/ SDG' Tahun 2020-2024 | Jumlah dokumen (Lapora hasil monitoring dan enaluasi program unggula i OPO) di sektor Pemerintahan | 1 1 | 1 | 1 1 Dokur | in 250.000.00 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332,750,000 | 166.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | P P E d d P K K | rogram Yerc kerneranan kerneranan kerneranan kerneranan kerneranan berjakan Indonesia dan kerneranan kernerana | rcapainya Pi ediansian antana In cumini Di Si gitup Bidang R elatraktur dan ki elayahan RPJMD C 1 RKPD. Si V | Persentasie kesiesuain hasid evaluaisi capalian indikater kiran'ja sissiaran tahunan RPJMD dengan kegistan pada Ramstra dan Ramja ODD bidang Infinastruktur dan Pengembangan Wilayah | Capalan indikator sisiaan bidang infrastrukur pada 893MD dibagi banget indikator 893MD dikali 100 % | 200 200 | 100 | 100 100 | % 3.200 | 3.520.600.0 | 3.872.000.000 | 4.259.200.000 4.685 | 120.000 Perencanaen, koodi den Analisis(Kejan Kebijakan Pembangu Infesetruktur | ni Tensasannya dokumen analaisi kabijakan di seleto ian pikorjaha umum dan pentalain ruang, parhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penditain dan pengembangan | Jumish dokumen (Lapora- haili koordinasi/verifikasi panyusunan renstia dan renja 070, dokumen arasiliyikujin sishibijain pembangunan) di sektor pekelajan uram dan pentaban naran, pentabungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penditian dan pengerbangan | 1 2 2 | : 2 | 2 2 Dokur | 350.000.00 | 0 385.000.000 | 423.590.000 | 465.850,000 | 12.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perencanaan, koordir dan Analisis/Kejian Kebijakan Pembangu SDA dan LH | sii Tenusunnya dokumen laporan kebijakan KLHS an | Jumilah dokumen (Lapona hasil monitoring dan esakuasi program unggula OPO) di sektor SDA dan LH | n 2 2 | : 2 | 2 2 Dokur | en 350.000.00 | 385.000.000 | 423.500.000 | 465.850.000 | 12.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perencanaan, koondi dan Analisis/Kojian Kelojiskan Pembangu Talansang dan Kawa Pernakiman | nii Tersusunnya Dokumen RISPAH dan Dokumen An Johan belipikan di sektor in permakiman pelakan dan kenjaan uman dan penataan ruan pertanahan, kominfo, persandan dan statistik, dan perencanakan | Jumlah dokumen (Lapona hairi keordinasilyeefikasi penyusuan rentak airi menja OPIO, dokumen analis/kajien kelipikia ja pembanguan ji disidor perumahan dan kawasan perenkirana, pelerjaan umum dan pendalan nuang, pertanahan, komiefo, persandan dan statistik, dan perencanaan | 1 2 2 | : 2 | 2 2 Dokur | 1.000.000.00 | 0 1.100.000.000 | 1.210.000.000 | 1.331.000.000 1.4 | 64.100.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | si Tenusunnya laporan montoring dan evaluasi uktor program unggular OPO sikitor pikerjain umum dan pentalan mang, perhubungan, energi dan sumberdaja minesal, dan penalitian dan pengerbangan | | | 1 | 2 1 Dokum | 250.000.00 | 0 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 3 | 866.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | si Tensusunnya Laporan has pemantasan, evaluasi dan n LH pelaporan penurunan Emi GRK | Li. | | 1 | 1 1 Dokum | 500.000.00 | | 605.000.000 | 665.500,000 | 32.050.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring dan Evalu capalan kinerja Perribangunan Tatan dan Kawasian Perrubi | si Tensusunnya Laponan has monbofing dan evaluasi di siktor perumahan dan kawasia permutiman, pekarjaan umum dan pendalam ruing, pertanahan, koesunikasi dan informatika, pentandi dan statistik, dan perencinakan | I Jumlah dokumen (Laporal hasil monitoring dan esakasi program unggula 0°P0) di sektor perumahal dan kawasian pemukiman pekerjian unsam dan penataan rusang, in pertanahan, kominfo, persiandian dan statistik, dan perancanaan | 1 1 | 1 | 1 1 Dokur | in 250,000,00 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 | 166.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % 1.300 | .000.000 1.430.000.0 | | 1730.300.000 1.943 | Penunjang Program SPDMSP (Integrated Participacy Developer And Management Int | Tensusunnya Laporan hasi koondinasi pelaksanaan program IPDMIP ation | Jumlah dokumen (Lapona hasil pelaksanaan Program IPOMIP) | | 1 | 1 1 Dokum | sin 500.000.00 | | 605.000.000 | 665.500.000 | 32.050.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | p E P C K | rogram engendalian dan valusiai Rencana capa ambangunai orba areah dan abupaten/Kota | nacutarityu k menuhan k nalam kinerja K D dan hupaten/ Kota | Persentasie capallan kinerja OPD dan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen evaluasi capalan program/ kegiatan yang dislesakan oleh BAPPEDA dibagi Jumlah dokumen evaluasi capalan program/ kegiatan yang ditargetkan tahun berkemaan dikali 100% (5/5 x 100%) | 200 200 | 100 | 100 100 | 74 1.300 | 1.50.00 | 137100000 | 1.90.300.000 | 925.500 Monitoring dan Evalu Program/Kepiatan AF | si Teinusunnya biku liporaral pelaksanian program dan kapitan APBD yang dimonitoring | Jumlah buku laponan palakanaan program dan kapistan AREO yang dimonitoring | | | 1 1 Buk | 250,000,00 | 275.000.000 | 32.50000 | 332.790000 | 8.02.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluasi Capalan Kin RP3PD, RP3MD dan R | dan RKPD | Jumlah dokumen evaluasi capalan RPJPD, RPJMD, dan RKPD | 4 4 | 4 | 4 6 Dokum | en 400.000.00 | | 544.500.000 | | i88.792.500 i96.288.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengendalan dan Ev Perencanaan Kabupaten/Kota Pengendalan dan Ev Pelaksanaan Program Perserintah Program | tuasi Tersusunnya dokumen Dokumen hasil fasilitasi Musenshang Kibly Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubaha Waki Kuta Tersusunya Laporan Dekon Tuzasi Pembantusi | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbarg Kab; Kota, Dokumen hasil fasilitasi RXPD dan RXPD Perubahan Kab Kota Jumlah laporan Dekon/ TPJ DAK dan laporan monitoring | 2 2 | 2 | 3 Dokur | en 400.000.00 | 0 440.000.000 | 494.000.000 242.000.000 | 532.400.000 5 266.200.000 2 | 96.288.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | P P A P | rogram Terli engolahan dan Pem nalasis data layar erencanaan dan | faksananya P menchan k anan informasi o n data capalan p | Persentase kutersediaan data capalan per prioritas pembangunan | Jumlah upload informasi geospasial dibagi jumlah total upload data geospasial bersatik di kali 100% | 100 100 | 100 | 100 100 | % 1.050 | .000.000 1.155.000.0 | 1.270.500.000 | 1.397.590.000 1.533 | Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat 305.000 Pengolahan dan Anal Data Geospasial Urts. Perencanaan | Lassi Tensusunya Laporan Dekon/Tugais Pembantua (TP/DAK dan Laporan Monitoring is Tensedianya Informasi Geospasial Tematik | monitoring Jamiah peta informasi Geospasial Tematik | 100 10 | 0 100 1 | 00 100 Pub | 390.000.00 | 385.000.000 | 423.500.000 | 465.850.000 | 12.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Indi Perry Perry Date | Blator Kinerja nyelengganaan merintahan erah (EKPPD). | | data geospasial tematik di kali 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | PRO | GRAM | | | | | | | | | KEGI | ATAN | | | | |
|-------------|---------|-----------------------|------------------------|---------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|--|---|--|---|---------|--------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|--|---|---|---------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--|
| NO MISI TUI | UJUAN 1 | TUDUAN TUDUAN SASARAN | INDIKATOR SASARAN T | UJUAN INDIKAT | OR KON | IDISI TARGET T | FORMUL | LA SATUAN | SASARAN | INDIXATOR | TARGET 2022 | NAMA PROGRAM 19 | SASARAN PROGRAM 20 | INDIKATOR PROGRAM | FORMULA | TA1 | RGET KINERJA | 22 2024 | SATUAN 2020 2 | ANGGARAN | 2022 | 2024 | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TAR | RGET KINERJA | SATUAN | 2020 | 2021 | ANGGARAN | 2023 2024 266.200.000 292.820.000 |
| 1 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8 9 | 1 | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 1010 | 23 | | 24 | 25 | 1 | | 26 Pengembangan | 77 Tersedianya layanan | 78 Jumlah layanan | 175 175 | 29 175 175 | 175 Bush | 200.000.000 | 220.000.000 | 31 242.000.000 | 266.200.000 292.620.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung | pengelolaan bahan pustaka E-Book | Jumlah layanan a pengelolaan bahan pustaka E-Book | | | | 600,000,000 | 660,000,000 | 726.000.000 | 798.600.000 878.460.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan | Tensedianya aplikasi data informasi penencanaan | Jumlah keterisian E- Database dan Siskurtanas | 80 80 | 80 80 | | | | 720.000.000 | 798.800.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional | Tersedianya informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung | Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung | 100 100 | 100 100 | 0 100 Data | 200.000.000 | 220.000.000 | 242.000.000 | 266.200.000 292.820.000 |
| | | | | | | | | | | | | Program | Terpenuhinya | Persentase Lavanan | Jumlah layanan | 100 100 | 100 10 | 100 | % 2.593.200.000 2.85 | 2.520.000 3.137.772.00 | 3.451.549.200 | | | Tenedarya layanan | Jampung Jumlah layanan | 12 12 | 12 12 | 12 Bulan | 620.000.000 | 682.000.000 | 750.200.000 | 825.220.000 907.742.000 |
| | | | | | | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran | administrasi perkantoran | n Jumlah layanan administrasi perkantoran RAPPPEDA tahun berkenaan dibagi jumlah layanan administrasi RAPPEDA dikali 100% (10/10 x 100%) | | | | % 2.593.200.000 2.65 | | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Para Cola | parama | | berkenaan dibagi jumlah layanan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | BAPPEDA dikali 100% (10/10 v | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100%) | | | | | | | | | | | | | | 285.000.000 | 222.000.000 | | 379.335.000 417.268.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya layanan administrasi keuangan | Jumlah layanan administrasi kecangan | 12 12 | 12 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ļ | Penyediaan Jasa Kehesihan Kantor Penyediaan Jasa dan | Tersedianya layanan kuhanihan kantor Tersedianya layanan nerhalkan neralahan keria | Jumlah layanan kebersihan kontre Jumlah layanan perbaikan peralatan keria | 12 12 | | : 12 Bolin : 12 Bolin | | 187.000.000 71.500.000 | 205.700.000 78.650.000 | 226.270.000 248.897.000 86.515.000 95.166.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŀ | Kebershan Kentre Penyediaan Jasa dan Dehakan Deslatan Keria Penyediaan Alat Tulis | nerhalkan neralatan keria Tersedianya layanan | | 12 12 | | 12 Bulan | 65.000.000 | 71.500.000 | 78.650.000 | 86.515.000 95.166.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa | Tersedianya layanan nennariaan ATK Tersedianya layanan baran n cetak dan penggandaan | ATK ng Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan | 12 12 | 12 12 | : 12 Bulan | 60.000.000 | 66.000.000 | 72.600.000 | 79.860.000 87.846.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | Tersedianya layanan peralatan dan perlengkapa krates | | 12 12 | 12 12 | : 12 Bulan | 350.000.000 | 385.000.000 | 423.500.000 | 465.850.000 512.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ľ | Penengsapan Kantor | kantor | n dan piningcapan kantor | | | 12 Bulan | 35.000.000 | 38.500.000 | 42.350.000 | 46.585.000 51.243.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rumah Tangga dan Peralatan Listrik | Tersedianya layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik | rumah tangga dan peralatan listrik | | 12 12 | 11 0000 | 333330 | 20.202 | 42.330.000 | 4.3333 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŀ | | | | 12 12 | 12 12 | 12 Bulan | 35.000.000 | 38.500.000 | 42.350.000 | 46.585.000 51.243.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŀ | undangan Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya layanan bahar bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya layanan layanan makan minum | perundang-undangan Jumlah layanan makan | 12 12 | 12 19 | 12 Bulan | 45.000.000 | 49.500.000 | 54.450.000 | 59.895.000 65.884.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | layanan makan minum | Jumlah layanan makan minum | | | 0 150 Kali | 400,000,000 | 440.000.000 | 484 000 000 | 532,400,000 585,640,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaa | Jumlah koordinasi dan n konsultasi | 150 150 | 150 150 | 0 150 Kali | 400.000.000 | 440.000.000 | 484.000.000 | 532,400,000 585,640,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ | Penyediaan Jasa Keamana Kantor | n Tersedianya jasa keamana kantor | n Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan | 6 6 | 6 6 | 6 Orang | 120.000.000 | 132.000.000 | 145.200.000 | 159.720.000 175.692.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 11 | 11 11 | . 11 Orang | 343,200,000 | 377.520.000 | 415.272.000 | 456 799 200 502 479 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis narkantrean | Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran | Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan | | | ii omy | 3010000 | 377.320.000 | 42,272,000 | 30.03.10 |
| | | | | | | | | | | | | Program | Terpenuhinya | Persentase sarana | Jumlah pengadaan | 100 100 | 100 10 | 100 | % 2.351.800.000 1.81 | 6.980.000 1.998.678.00 | 2.198.545.800 | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan | 1 0 | 0 0 | 0 Unit | 700.000.000 | | 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apanat | Terperuhinya penyadiaan dan pemelihanaan ir sarana dan prasarana perkantoran | dan prasarana kant yang tersedia dan terpelihana | or sarana dan prasarana yang direalsasikan dibagi | | | | | | | ľ | dinas/operasional | dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | prasarana perkantoran | | jumlah sarana dan prasarana yang disebahan dalam | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ase sarana sarana kantor sarana kantor sarana dan prasaaraa yang diradisaskan dibagi yanlah sarana dan prasaanaa yang dibatapkan dalam DPA dibagi 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tensedianya perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 1 | 1 1 | 1 Paket | 500.000.000 | 550.000.000 | 605.000.000 | 665.500.000 732.050.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkali oeduno käntor | Terpenuhinya pemeliharaa rutin/berkala gedung kanto | n Jumlah pemeliharaan or rutin/berkala oedung | 4 4 | 4 4 | 4 Paket | 676.800.000 | 744.480.000 | 818.928.000 | 900.820.800 990.902.880 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ,, | ,,, | kantor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ | Pemeliharaan rutin/berkali kendaraan | Terpenuhinya pemeliharaa rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | n Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 17 17 | 17 17 | 17 Unit | 400.000.000 | 440.000.000 | 484.000.000 | 532.400.000 585.640.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemelhanan rutin/berkali perlengkapan gedung kantre | Terpenuhinya pemeliharaa rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | n Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan narkann kantor | 1 1 | 1 1 | 1 Paket | 75.000.000 | 82.500.000 | 90.750.000 | 99.825.000 109.807.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ľ | | ,, | ,, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Program Presidentes | Terpenuhinya | Persentase capaian | Total capaian | 100 100 | 100 10 | 100 | % 715.000.000 78 | 6.500.000 865.150.00 | 951.665.000 | 1.046.831.500 | Pengembangan Kementeni terustra dan | Terlaksanyanya pelatihan/ | Jumlah ASN yang mengkuti bimtek, dan sosialisasi | 30 30 | 30 30 | 30 Orang | 200.000.000 | 220.000.000 | 242.000.000 | 266.200.000 292.820.000 |
| | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daeral | Terpenuhinya Kualitas dan Kapasitas kalembagaan Bappeda | Persentase capalan kapasitas kelembagaan perangkat daerah | Total capaian kinerja ASN dibagi jumlah ASN Bappeda (yang benkapitulasi dalam B. Kinesis) | | | | | | | | Jabatan Fungsional | Terlaksanyanya pelabhan/ dikiat pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional | sosialisasi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | r-rangeat claims | Japanel | | E Planets) | | | | | | | | | | | 97 97 | 97 98 | 98 % | 190.000.000 | 209.000.000 | 229.900.000 | 252.890.000 278.179.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŀ | Peningkatan Kehumasan | Terlaksananya pangembangan Budaya Keria rian disiriin ananahur Tersedianya pelayainan Kehumasian dan Pelayanan Kehumasian dan Pelayanan Kehumasian Jinformasi Publik | Jumlah pelayanan Informasi publik | 15 15 | 15 15 | 15 Paket | 200.000.000 | 220.000.000 | 242.000.000 | 266.200.000 292.820.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | oan Pelayanan Keterbuka Informasi Publik | re kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik | reornasi publik | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tersedianya pengadaan pakalan dinas beserta kelengkapannya | Jumlah Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya | 150 150 | 150 150 | 0 150 Shel | 125.000.000 | 137.500.000 | 151.250.000 | 166.375.000 183.012.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ľ | | kelengkapannya | perlengkapannya | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Program Bereranaan | Tersusurnya dokumen | Persentase nemeroban dokum | Jumlah pemenuhan en dokumen | 100 100 | 100 10 | 100 | % 1.100.000.000 1.19 | 6.250.000 1.304.325.00 | 1.422.514.500 | 1.564.765.950 | Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja | Tersusunnya dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen nelengan dan meluasi | 5 7 | 7 7 | 7 Dokumer | 250.000.000 | 275.000.000 | 302.500.000 | 332.750.000 366.025.000 |
| | | | | | | | | | | | | Evaluari dan keuangan, serta | perencanaan, evaluasi dan | Perencanaan, Evalu dan keuangan, sert | asi Perencanaan, a Evaluasi dan | | | | | | | ľ | Linuan Kinga | Kinerja | Jumlah dokumen pelaponan dan evaluasi kinerja (LKS, evaluasi Renja, evaluasi Rancana Alosi, LIPO(LISP3, Evaluasi Hasil Ranja Triwulan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | asset Perangkat Daerah | keuangan, serta asset yang tepat waktu | asset yang tepat waktu | keuangan, serta asset yang tepat waktu dibagi | | | | | | | | | | Aksi, LPPD/LKP3, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | keuangan, serta asset yang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah pemeruhan en dekurren aia Premoranan, Evaluais dan keuangan, serta asset yeng bost waktu dibagi jumlah dekurren Premoranan, Evaluasi dan keuangan, serta asset yeng ditargetkan dikali 200% (18/15 x 100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | Penyusunan Laporan Capalan Keuangan | Tersusunnya dokumen Laporan Capalan Keuangar | Jumlah dokumen n pelaporan capalan kecaman CPD | 2 2 | 2 2 | 2 Dokumer | 175.000.000 | 192.500.000 | 211.750.000 | 232.925.000 256.217.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | } | Penyusunan dokumen penencanaan | Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda | | 8 7 | 7 7 | 8 Dokumer | 275.000.000 | 288.750.000 | 306.075.000 | 324.439.500 356.883.450 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | perencarean | perencanaan Bappeda | Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ļ | December o | Transferon sein C 2 2 | | 10 10 | 10. ** | W D | 350 000 000 | 385.000.000 | 423 500 000 | 465.850.000 512.435.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Į, | Pengembangan e- Government OPD dan Publikasi Pembangunan | Tersedianya anip digital dokumen perencanaan BAPPEDA | Jumlah ansip digital dokumen perencanaan Bappeda | 10 | 10 10 | JU LICKUMEN | 330.000.000 | 385.000.000 | 423.500.000 | ~ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset | Tensusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Baran dan Pengelolaan Asset | | 3 3 | 3 3 | 3 Dokumer | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 73.205.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ľ | keputuhan Barang dan Pengelolaan Asset | nencana Kebutuhan Baran dan Pengelolaan Asset | g kebutuhan basang dan pengelolaan asset | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 1 | | | | | |

